

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)**

Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) menjadi salah satu instrumen pengendalian yang diharapkan dalam implementasinya dapat benar-benar secara riil memecahkan permasalahan problematika kemiskinan yang berwajah perempuan di tingkat keluarga. Program tidak hanya sebagai upaya jangka pendek untuk memberikan bantuan kepada KRTP tetapi terlebih dari pada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (poverty trap) pada KRTP.

Feminisasi kemiskinan tidak hanya konsekuensi dari kekurangan pendapatan saja namun juga hasil dari perampasan kemampuan dan bias gender yang hadir dalam masyarakat dan pemerintah serta juga akibat meningkatnya insiden “ibu” sebagai kepala rumah tangga tunggal. Prioritas terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan jika dibandingkan laki-laki dikarenakan meskipun seorang laki-laki dan perempuan sama-sama miskin namun kemiskinan tersebut disebabkan oleh alasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda serta kemampuan yang berbeda pula dalam menghadapinya.

Kondisi permasalahan dan kemiskinan yang dihadapi rumah tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) secara umum lebih kronis jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga laki-laki. KRTP tidak hanya mengalami permasalahan pada sektor ekonomi namun juga probelematika psikologis, sosial, dan budaya. Kebutuhan untuk mendapatkan jalan keluar dari perangkap kemiskinan tidak cukup jika hanya melalui fasilitas akses ekonomi tetapi juga memerlukan dukungan interaksi secara intensif dari sosok atau figur yang secara keseharian sudah dikenal dan dinilai mampu memberikan perlindungan serta memiliki legitimasi sosial.

Figur tersebut yang selanjutnya menjadi "*Mother care*" atau sebagai sosok ibu atau orang tua yang menjadi simpul interaksi dan berbagi antar KRTP sehingga akan memupuk harapan serta semangat berjuang bersama-sama dalam upaya keluar dari perangkap kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing KRTP. Berdasarkan kebutuhan tersebut kader dari tim penggerak PKK adalah figure yang tepat jika diposisikan sebagai "*Mother care*" bagi KRTP. Gerakan PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, jejaring PKK dapat menjangkau kepada keluarga-keluarga secara langsung karena telah terbentuk PKK di tingkat RW, RT dan kelompok desa wisma, sehingga melalui optimalisasi TP-PKK dalam Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan diharapkan dapat benar-benar secara riil memecahkan permasalahan kemiskinan yang berwajah perempuan di tingkat keluarga.

Dalam pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan terdapat 3 indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, indikator tersebut yaitu tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan. Tepat sasaran yaitu Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah rumah tangga yang tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2015, RTS dilakukan verifikasi untuk mengetahui kondisi obyektif saat ini sekaligus melakukan validasi apakah RTS yang dimaksudkan masih layak memperoleh bantuan program atau tidak, RTS yang tidak layak akan dilakukan penggantian melalui mekanisme rembug warga dengan tidak menambah alokasi RTS masing-masing desa.

Indikator ke dua yaitu tepat jumlah, tepat jumlah diartikan dengan pemberian bantuan kepada RTS berupa uang tunai sebesar RP. 2.500.000 yang diterima secara langsung dalam bentuk barang modal, pembelanjaan barang modal tersebut dilakukan oleh RTS dengan difasilitasi oleh pendamping desa. Indikator ketiga yaitu tepat pemanfaatan yang dapat diartikan dengan realisasi pembelanjaan barang untuk usaha dilakukan oleh KRTP sendiri dengan didampingi oleh pendamping desa sehingga diharapkan KRTP mendapatkan barang kebutuhan sesuai dengan rencana KRTP tersebut.

Untuk memenuhi ke tiga kriteria keberhasilan pelaksanaan program tersebut banyak tahap yang harus dijalankan oleh organisasi pelaksana program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK). Jika tahap tersebut dikorelasikan dengan teori dari Isbandi Rukminto tentang tujuh

tahapan pemberdayaan, maka tahap tersebut dapat dikelompokkan kedalam bagian-bagian seperti pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**

**Korelasi tahapan pemberdayaan Isbandi Rukminto dengan proses pemenuhan keberhasilan pelaksanaan program PFK**

No	Proses Pemenuhan Keberhasilan Pelaksanaan Program	No	Tahapan Pemberdayaan Menurut Teori Isbandi Rukminto
1.	Sosialisasi provinsi	1.	Tahap persiapan
2.	Sosialisasi kabupaten		
3.	Pra rembug warga		
4.	Rembug warga		
5.	Ferifikasi penerima bantuan	2.	Tahap assesment atau identifikasi masalah
6.	Pembentukan pokmas KRTP	3.	Tahap perencanaan alternatif
7.	Pendalaman kebutuhan KRTP		
8.	Pengajuan pencairan dana	4.	Tahap formulasi aksi
9.	Pencairan	5.	Tahap pelaksanaan
10.	Realisasi bantuan		
11.	Bimtek		
12.	Pengelolaan usaha		
13.	Pertanggungjawaban	6.	Tahap evaluasi
14.	Keberlanjutan program	7.	Tahap terminasi atau pemutusan hubungan

Tahap persiapan yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan yaitu melihat kelayakan daerah sasaran program pemberdayaan. Pada tahap ini untuk menyamakan persepsi antar anggota tim fasilitator mengenai bantuan program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK). Dalam proses pemenuhan keberhasilan pelaksanaan program Jalin Matra PFK penyamaan persepsi dilakukan dari sosialisasi provinsi hingga sosialisasi desa yang diwadahi dalam kegiatan rembug warga.

Sosialisasi provinsi dan kabupaten dilaksanakan dan difasilitasi langsung oleh DPMD provinsi selaku leading sektor dalam program ini, agenda kegiatan yang dijalankan dalam proses ini adalah penjelasan tentang PFK, sinkronisasi dan integrasi program atau kegiatan untuk mendukung PFK dan membahas rencana tindak lanjut pelaksanaan. Sedangkan sosialisasi Kecamatan dan desa dilaksanakan oleh pendamping kabupaten yang difasilitasi oleh DPMD kabupaten yang dilaksanakan melalui kegiatan pra rembug dan rembug warga, pra rembug warga adalah pertemuan khusus yang diadakan sebelum rembug warga yang bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan rembug warga dengan agenda pembentukan dan penetapan sekretariat desa selaku pelaksanaan program di tingkat desa dan penjangkaran, serta penetapan 2 pendamping desa yang mana diprioritaskan berjenis kelamin perempuan dan berasal dari kader PKK desa lokasi sasaran yang mana salah satu pendamping desa harus menguasai komputer, tetapi di desa Bukur 2 pendamping desanya tidak menguasai komputer sehingga semua pengolahan data dilakukan oleh pendamping kabupaten.

Sedangkan rembug warga bertujuan mensosialisasikan program Jalin Mata PFK kepada sekretariat desa dan pendamping desa dimana kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota sekretariat desa, BPD, Kasun lokasi RTS, perwakilan KRTP, tokoh masyarakat dan pendamping dan untuk klarifikasi KRTP penerima bantuan. Kegiatan pra rembug dan rembug warna ini juga dijadikan media pendekatan antar pendamping dan KRTP sasaran. Sedangkan wilayah yang menjadi sasaran program ini sudah ditentukan oleh pemprov

Jatim setiap tahunnya, wilayah atau desa yang mendapatkan bantuan program ini bergilir dari wilayah satu ke wilayah yang lain agar terjadi pemerataan program. Di Desa Bukur bantuan modal usaha dari Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) digunakan untuk beberapa jenis usaha yaitu pengrajin keset, warung makanan, toko prancangan dan ternak kambing, tapi mayoritas digunakan untuk usaha pengrajin keset dan ternak kambing. KRTP sasaran di Desa Bukur tersebut lebih memilih untuk menjalankan usaha ternak dibanding usaha ekonomi produktif atau perdagangan dikarenakan sudah tua dan tidak memiliki keahlian apa-apa padahal usaha ternak ini sebenarnya tidak terlalu dikehendaki oleh penyandang program, karena salah satu tujuan Pemprov Jatim mengucurkan bantuan ini adalah untuk menumbuhkan perekonomian kreatif masyarakat khususnya KRTP melalui dunia usaha.

Tahap Assesment merupakan tahapan pengidentifikasian masalah yang dirasakan sasaran program pemberdayaan sekaligus mengidentifikasi sumberdaya apa saja yang dimiliki oleh sasaran. Dalam proses pemenuhan keberhasilan program tahap ini dilakukan pada proses ke lima yaitu verifikasi penerima bantuan, dimana dalam kegiatan verifikasi penerima bantuan terdapat kriteria kelayakan penerima bantuan dan apabila setelah diverifikasi ternyata KRTP sasaran sudah tidak sesuai dengan kriteria tersebut maka KRTP sasaran bisa diganti melalui rembuk warga dengan pendampingan langsung oleh pendamping kabupaten. Dalam pelaksanaan verifikasi ini sangat diperlukan peran serta antara Kepala Desa dan perangkatnya agar

dalam proses pemferifikasian dan pergantian KRTP yang tidak sesuai dengan kriteria program bisa berjalan lancar, aman dan transparan. Berdasarkan pada hasil rebug warga Desa Bukur dihasilkan masukan bahwa dari 22 RTS ada 6 RTS yang dinyatakan tidak layak mendapatkan bantuan dikarenakan sudah meninggal dan status ekonominya sudah membaik. Adapun kriteria KRTP yang layak untuk menerima bantuan berdasarkan pedoman umum program Jalin Matra PFK 2018 antara lain : telah bercerai, suami meninggal, ditinggal suami dalam waktu yang lama dan tidak mendapatkan nafkah (ditelantarkan), serta memiliki suami yang difabel atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktivitas produktif. Untuk RTS yang tidak layak tersebut dicarikan pengganti yang sesuai prosedur KRTP.

Setelah pengidentifikasian masalah tahapan pemberdayaan selanjutnya yaitu dilakukan perencanaan alternatif program dimana pada tahap ini fasilitator atau pendamping kabupaten maupun pendamping desa secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapinya beserta pemecahannya. Kegiatan ini diwadai pada point enam dan tujuh yaitu pembentukan pokmas dan pendalaman kebutuhan KRTP sasaran program. Pembentukan pokmas didasarkan atas kesamaan jenis usaha atau kedekatan rumah tinggal, dalam kelompok masyarakat dibentuk pula ketua dan bendahara kelompok serta rencana tindak lanjut kelompok tersebut. Pokmas yang dibentuk oleh KRTP tersebut dalam struturnya harus mempunyai ketua dan bendahara, penentuan siapa yang menjadi ketua dan bendahara tersebut di musyawarahkan bersama antar

anggota pokmas didampingi pendamping kabupaten dan pendamping desa. Desa Bukur terbentuk 2 pokmas.

Kegiatan pendalaman kebutuhan ini disesuaikan dengan keahlian, kebutuhan dan keinginan KRTP sasaran yang bersangkutan. Realisasi investasi usaha berupa sarana prasarana usaha utama yang dibutuhkan KRTP dalam rangka mengembangkan usaha atau membuka usaha baru. Bantuan satu KRTP dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana lebih dari satu Anggota Rumah Tangga (ART) dalam rangka mendukung usaha produktif yang dijalankan.

Setelah tahap perencanaan alternatif dilakukan formulasi aksi terhadap apa yang KRTP gagas pada tahapan sebelumnya dalam bentuk tulisan atau pengajuan proposal sesuai dengan point ke delapan yaitu pengajuan pencairan dana. Pengajuan pencairan dana ini dilakukan melalui pokmas dimana KRTP harus menuliskan ide atau gagasannya dalam bentuk proposal, kegiatan ini sepenuhnya difasilitasi oleh pendamping kabupaten, dikarenakan di Desa Bukur tidak memungkinkannya apabila dilaksanakan oleh pendamping desa karena 2 pendamping desanya tidak menguasai komputer

Proses pemenuhan keberhasilan pelaksanaan program point sembilan hingga dua belas masuk kedalam tahapan pelaksanaan pemberdayaan dimana pada tahap ini dilaksanakan pencairan dana dari pemprov kepada KRTP sasaran melalui desa dan pokmas yang telah dibentuk. Dana dari pemprov tersebut sudah ditentukan peruntukannya untuk apa saja ketika dana tersebut

diterima KRTP sasaran, yang mana minimal 90% dana yang diterimakan tersebut dialokasikan untuk modal usaha maupun usaha pendukung dan maksimal 10% digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Pada tahap ini juga diadakan bimtek yang mana di Desa Bukur diadakan bimtek pekatihan pembuatan kue brownies dari singkong yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Tulungagung. Dalam realisasi bantuan, di Desa Bukur dilaksanakan bersamaan di Balai Desa.

Setelah bantuan tersebut direalisasikan dan dijalankan, maka usaha yang dijalankan KRTP di evaluasi sampai sejauh mana keberhasilan pengelolaan bantuan tersebut yang kemudian dari hasil evaluasi tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Dalam proses evaluasi pemerintah melaksanakan kegiatan monitoring terhadap perkembangan usaha yang dijalankan KRTP sasaran, monitoring tersebut dilaksanakan pada bulan ke dua atau ketiga pasca realisasi program. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan 3 kali oleh pendamping kabupaten dan pendamping Kabupaten dan 1 kali oleh DPMD Tulungagung.

Tahap terakhir dari kegiatan pemberdayaan menurut Isbandi Rukminto yaitu terminasi atau pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat sasaran yaitu KRTP, tahap ini seharusnya dilakukan ketika RTS sudah mampu mandiri dan bukan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya. Secara formal pada program Jalin Matra PFK terminasi atau pemutusan hubungan dilakukan ketika penyandang dana menghentikan bantuannya, namun secara non formal terminasi tidak benar-

benar dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan ditingkat paling bawah yaitu desa. meskipun secara formal kegiatan PFK sudah selesai, namun pendamping desa tetap memantau perkembangan usaha yang dijalankan oleh KRTP sasaran program melalui kegiatan kemasyarakatan dan keseharian yang ada. Dalam pemantauan keberlanjutan usaha di Desa Bukur saat ini diketahui terdapat 1 KRTP yang menjual kambingnya dikarenakan KRTP tersebut sakit dan untuk biaya berobat, Ada juga KRTP yang menjual kambingnya karena kambingnya sakit-sakitan tetapi usaha utamanya masih berjalan.

Proses pemenuhan keberhasilan program pada tahap terminasi yaitu adanya keberlanjutan program, meskipun program tersebut sudah dilakukan pemutusan hubungan secara formal, dalam hal ini pemerintah provinsi lewat pendamping kabupaten memfasilitasi dan memonitoring KRTP sasaran melalui web jarak lurik (jaringan retail kelompok usaha sedulur cilik) atau mother care Jaim yang telah disediakan. Melalui web ini pendamping kabupaten mempromosikan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh KRTP sasaran, usaha yang dipromosikan pendamping kabupaten adalah usaha yang masuk dalam kategori berjalan atau berkembang.

Berdasarkan dari uraian pembahasan diatas Program Jalin Matra PFK merupakan program pemberdayaan yang sesuai dengan teori yang sudah dipaparkan dalam Bab II mengenai pemberdayaan menurut Sulustiyani pemberdayaan memiliki arti mendekatkan masyarakat pada sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk menentukan kapasitasnya

dalam menentukan masa depan mereka dan untuk berperan serta di dalamnya, juga memberikan pengaruh pada kehidupan di komunitasnya. Dalam pendekatan penguatan masyarakat melalui pemberdayaan, dimaksudkan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program atau bantuan, akan tetapi membuat masyarakat memiliki keyakinan yang lebih besar akan kemampuan dirinya.<sup>1</sup>

Dan diperkuat dengan hasil penelitian Septaningsih, melakukan Penelitian berjudul “Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan”.<sup>2</sup> Septaningsih berpendapat bahwa melalui pemberdayaan, perempuan mempunyai kesadaran akan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya dan posisi dalam budayanya, sedangkan pemberdayaan melalui pelatihan ketrampilan yang disesuaikan dengan potensi lokal dapat meningkatkan motivasi untuk membentuk usaha ekonomi produktif. Melalui penyadaran lingkungan hidup, kelompok mampu mengembangkan diversifikasi olahan pangan berbahan dasar lokal.

Pemberdayaan ekonomi melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Pada prinsipnya pemberdayaan merupakan upaya untuk mendinamisasikan faktor-faktor

---

<sup>1</sup> Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal.77

<sup>2</sup>Rosalia Indriyati Septyaningsih, *Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan*, (Jurnal seminar nasional Universitas PGRI Yogyakarta, 2015), hal 512-524

penting yang ada pada keluarga yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampun keluarga yang dimulai dari aspek mengenali masalah, kebutuhan, aspirasi dan menghargai potensi yang dimiliki serta mempercayai tujuan yang ingin dicapainya.<sup>3</sup>

## **B. Dampak Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Desa Bukur**

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dilaksanakan dengan mengintegrasikan kesadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan Kepala Rumah Tangga Perempuan sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Aktifitas yang dilahirkan dari Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan tentunya mempunyai asas kemanfaatan yang berbeda terhadap masing-masing usaha yang dijalankan oleh RTS sasaran, dari kemanfaatan tersebut bisa dilihat seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi atau pendapatan RTS, apabila terjadi peningkatan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan maka akan tumbuh budaya usaha mandiri pada RTS khususnya KRTP, namun apabila tidak terjadi peningkatan ekonomi atau pendapatan yang stabil maka budaya usaha mandiri tersebut tidak akan tumbuh.

---

<sup>3</sup> Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal 1-2

Untuk menilai keberhasilan program pemberdayaan, Sumodiningrat mengungkapkan indikator-indikator sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Jumlah penduduk miskin berkurang
2. Bermbangnya suatu usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatkan kemandirin yang ditandai dengan usaha produktif semakin berkembang, permodalan semakin kuat, sistem administrasi semakin rapi, serta semakin luasnya interaksi di dalam masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

Dampak yang dirasakan oleh penerima bantuan program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) di Desa Bukur adalah terjadinya perkembangan usaha dan terciptanya uaha baru yang mempengaruhi naiknya pendapatan Kepala Rumah Tangga Perempuan penerima bantuan, dua dampak tersebut bisa dikategorikan dalam kemandirian ekonomi, mandiri merupakan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas dengan benar dan bermanfaat atas dorongan dan kemampuannya bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Dua dampak tersebut jika dikorelasikan dengan indikator keberhasilan pemberdayaan dari

---

<sup>4</sup> Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*, (Bandung, UNPAD Press, 2016), hal. 61

teori Sumodiningrat maka program bantuan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) merupakan program yang berhasil dalam pembedayaan ekonomi keluarga di Desa Bukur.